

SAKARLUT

Kumpulan Esai Ekonomi

TWO EFLY



PENERBIT PACE
Tahun 2023

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SAKARLUT

Kumpulan Esai Ekonomi

TWO EFLY



PENERBIT PACE
Tahun 2023

Judul:

Sakarlut: Kumpulan Esai Ekonomi

Penulis : Two Efly

Copyright@2023

Oleh PACE Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia

Oleh

PACE

Partnership for Action on Community Education

Komplek Pondok Pinang

Kota Padang-Sumatera Barat

Cetakan Pertama: Februari 2023

ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

ANGGOTA



Kata Pengantar

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Alhamdulillah*, penulis kembali mampu menelurkan sebuah buku kompilasi ekonomi. Sama dengan buku buku sebelumnya, buku yang berjudul “Sakarlut” ini merupakan kumpulan tulisan yang sudah penulis terbitkan di Harian Pagi Padang Ekspres dan *www.padek.co*.

Buku dengan judul “Sakarlut” terdiri dari empat bagian. Setiap bagian menampilkan tema yang berbeda. Setiap bagian juga menggunakan cara dan gaya bahasa yang berbeda pula. Di setiap tulisan selalu terdapat karakter kritis penulis. Pilihan katapun kian bervariasi dan cukup banyak menggunakan kosa kata bahasa local.

Pada bagian pertama penulis menampilkan tema tentang Keuangan dan Perbankan. Pada bagian ini terdapat enam buah tulisan. Diantara tulisan itu adalah “Sakarlut”, - x- = +, Gimmik dan Momentum, Metaverse Perbankan, Berprestasi disaat Sulit, Ojo kesusu lah mas !!!, Musim sulit yang segera usai, On the track, Berhijrah dan Sinyal Kuning Ekonomi.

Pada bagian kedua berisikan anggaran. Baik anggaran belanja daerah maupun APBN. Ada lima tulisan ditampilkan pada bagian kedua ini. Pertama berjudul “Optimislah”. Tema ini berkaitan dengan

rendahnya target yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Kedua Fokuslah!!!. Ini terkait dengan sangat rendahnya serapan APBD 2022. Muaranya dari dua tulisan ini adalah APBD yang Kejar tayang. Selain itu juga ada tulisan berjudul “Membakar APBN”.

Pada bagian ketiga penulis mencoba menghadirkan tulisan berbeda. Melonjaknya sejumlah harga bahan pangan membuat anak negeri menjerit. Cabe dalam sebulan melonjak tajam. Lonjakan harga ini penulis tuangkan dalam tulisan berjudul “Padeh!!!”. Pada bagian ketiga ini juga ada tulisan berjudul “Tapaga Karambia Condong”, “Nyaris Bang Toyib”, Oto Rebound dan berang ka Mancik, Lumbuang nan dibaka.

Untuk bagian keempat penulis menghadirkan beberapa wacana baru termasuk pemekaran provinsi Sumatera Barat. Provinsi Pamalayu judul tulisannya. Ini beranjak dari geografis daerah yang terpaut jauh antara daerah tapal batas dengan ibu kota provinsi. Ada juga tulisan berjudul “Wisata Macet”, “Nagari rato rato Aia”, “Negeri Penuh Paradoks” dan “Pengulangan Sejarah yang terlupakan”

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada karia yang sempurna. Penulis juga menyadari itu. Masih banyak kekurangan dan kelemahan yang bisa ditemui dalam tulisan ini. Meskipun begitu, ditengah keterbatasan dan kelemahan penulis ini setidaknya penulis berupaya keras memberikan sumbangan pemikiran. Semoga saja melalui tulisan tulisan kritik yang menggelitik ini *stake holter* terpatik dan bekerja bersama memajukan ranah minang ini.

Padang, Januari 2023

Two Efly

Pengantar

Dr. Romeo Rissal Pandjiaalam

Walaupun baru hanya membaca judul-judul tulisan Two Efly dalam buku keempatnya ini, hati terasa *manggarumeh*. Judul-judul yang memuntahkannya kegelisahan dan kegemasan seorang wartawan senior. Kegelisahan yang ikhlas untuk negeri, tentunya. Seorang ekonom yang bukan hanya setia memantau dan



mengkaji dinamika perekonomian Sumbar tapi dia juga ada didalamnya. Dia paham persis perilaku ekonomi Sumbar. Bahkan dia harungi *kurenah* serta *kakobeh* para pelaku kebijakan dan politisi daerah. Karena dia mencermati data, mengamati proses kebijakan serta menemui dan berdialog dengan para pejabat daerah. Para politisi. Dia bergelut dengan keseharian issue-issue ekonomi dan sosial politik di ranah Minang. Ranah yang dikisahkan wartawan senior yang sangat produktif ini sebagai negeri *rata-rata* air. Pemerintahan dengan prestasi biasa-biasa saja. Kinerja yang belum memenuhi persyaratan untuk dikategorikan *kinclong*. Kinerja yang tak tertoleh oleh orang liwat sekalipun.

Membaca judul-judul tulisan dalam buku ini sungguh bak menikmati *curhatan* atau bisa juga *omelan* Koran Tempo terhadap JOKOWI. Tajam dan enak dibaca. Bagi kita. Di Koran Tempo ada judul menyentak *Panas Dingin Partai Pemerintah*, ada sodokan berbunyi *Main Tubruk Perpu Omnibus*, dan berbagai *kurenah* “tangan kanan”

sang Presiden, Luhut Panjaitan dan lain-lain tak luput dari curhatan Koran Tempo. Tajam tanpa tedeng aling-aling.

Tentunya di alam demokrasi dan demi kematangan kebijakan publik dan mengawal kepentingan rakyat, sentakan dan sodokan itu dibutuhkan. Agar Sang *Penguasa* tak bermain dengan klik dan lingkungan sendiri. Agar tersadarkan bahwa dia memimpin negara atau daerah. Buka memimpin kelompok atau partai. Ya agar tak terjadi *absolute power*. Jelas, sangat penting perannya.

Bedanya, Presiden Jokowi sempat merasa tersengat oleh judul-judul Koran Tempo itu. *Terpurangah*. Lalu *action*. Karena presiden yang belum mampu menaklukkan hati para pemilih Ranah Minang ini, paham persis arti dan peran kritik dalam sebuah demokorasi. Sumbar, kalau dari pendengaran samar-samar dari Rantau, kelihatannya tetap terlelap. Sepertinya kasus-kasus kepemimpinan seperti *Sekarlut* akat berlarut. Akhirnya hanyut. "*Hijrah Syariah*" bisa-bisa punah. Entahlah kalau dari pandangan Ranah jarak dekat. Tapi kita husnuzon, mungkin juga, masukan-masukan tentang berbagai masalah di Sumbar yang banyak diungkap, sedang *dikunyah-kunyah*. Baik di Pemda maupun di DPRD. Semoga!

Secara tajam tapi dengan gaya penulisan yang santai, Two Efly membedah berbagai persoalan penting negeri yang pernah menjadi *leader* ini. *Once upon a time, maso saisuak*, seperti kata cerita klasik. Ia memulai dengan salah satu issue yang sangat strategis dan krusial bagi pembangunan ekonomi Sumbar. Judulnya singkat tapi menghunjam. *Sekarlut*.

Sekarlut, bagi masyarakat pengopi di lapau-lapau, bisa terbaca hanya sebagai ungkapan *bagarah*. Ungkapan yang sering ditujukan pada kawan-kawan yang berbahasa Indonesia bercampur Minang. Biasanya "gaya" bicara sebagian perantau jarak pendek yang pulang kampung. Ya hanya sekedar lucu-lucuan.

Bagi sebuah lembaga apa lagi dalam hubungannya dengan kebijakan, jelas, *sakarlut* adalah fenomena yang sangat penting untuk dicermati. Harus segera diatasi. Sangat aneh bila luput dari bahasan para anggota DPRD. Fenomena kepemimpinan negeri yang tak main-main. Bila informasi dan data *Sakarlut* yang diungkapkan dalam buku ini benar adanya, harusnya DPRD tersengat. *Tapurangah*, seperti Jokowi dengan judul-judul di Koran Tempo. Anggota DPRD Sumbar

dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai *Owner* Bank Nagari (harusnya) *tasintak*. Bergerak cepat dengan bijak. Demi bank milik rakyat ini. Bukan “Milik Nenek Moyang” cakapnua anak Medan.

Sementara ini dari perusahaan milik daerah, Bank Nagari adalah harapan satu-satunya untuk menopang perekonomian daerah. Demi ekonomi negeri yang semakin jauh tertinggal dari adik kecilnya bernama Riau itu. Provinsi yang seolah digadang-gadang sang penguasa bagaikan “anak mas” baru lahir. Ditimang dan disenandungkan lagu-lagu *Bengawan Solo* nan indah. *Riwayatmu dulu.....* Ya mungkin karena kepemimpinan tetangga kita itu dinilai lebih luwes. Lebih tranngginas. Atau ada sebab lainnya? Berbagai program pemerintah pusat muncul dan seolah dimunculkan di sana. Pemerintah Jokowi pun seolah *baparago* dengan *malewakan* berbagai kehebatan yang diusung di provinsi tetangga itu. *Bumi Lancang Kuning* itu seolah bersorak ria: “ *Sumbar, kau ku tinggalkan di tikungan*”

Sedikit Ngelmu

Dalam Ilmu Management, fenomena *Sekarlut* ini disebut sebagai gejala *Indecisive Leadership*. Dalam Ilmu Politikpun sama. *Indecisive Leardership* adalah kepemimpinan yang tak tegas. Kepemimpinan yang lambat bergerak. Ia menjadi permasalahan yang sangat serius bila terjadi dalam perumusan kebijakan publik. Dalam tatanan daerah, kita tentunya berbicara pemerintahan bukan hanya pemerintah. Tapi Legislatif dan eksekutif. *Sekarlut* adalah fenomena di dua kelembagaan yang sangat penting tersebut.

Dalam percaturan politik, di negara maju misalnya, issue *Indecisive Leadership* menjadi issue yang sangat sentral. Douglas Bernheim dkk mengutip tokoh ilmu politik kondang Ted Anthony, dalam bukunya *The Theory of Indecisive Leardeship* menyatakan bahwa *Indecisive Leadership* bahkan dapat meneggelamkan kepresidenan. Dan faktanya memang, karakter *Indecisive Leadership* pernah menjungkirbalikkan kampanye presiden.

Sedikit Berkaca Ke Masa Lalu

Tak berbeda bila menyangkut sebuah bank. *Sekarlut* adalah wajah bopeng. Sangat fatal akibatnya terhadap bank. Kasus *Sekarlut* ini mengingatkan saya kepada penghujung 1996. Tepatnya pada pertemuan yang diinisiasi oleh seorang Alm Hasan Basri Durin di kantor Menteri Depnaker, Abdul Latief. Gubernur Sumbar yang

sangat rajin merangkul berbagai kalangan itu minta bantuan kepada para pengusaha *urang awak*. Dia ingin merespon berbagai keluhan sebagian masyarakat, baik di Ranah maupun di Rantau antara lain bahwa BPD Sumbar terlalu diatur dan didikte oleh Pemda. Pejabat Pemda tiba-tiba bisa “nongkrong” jadi bankir. Dan masalah lain-lainnya.

Hadir dalam pertemuan yang sangat bersejarah itu tokoh-tokoh pebisnis *urang awak* antara lain Menaker Abdul Latief, Nasrul Chas, Fahmi Idris dan beberapa pejabat BUMN serta Suharman SE, Dirut BPD pada waktu itu. Uniknya walau tak berpartai, sebagai orang bank, saya termasuk diundang dan bahkan diminta presentasi. Jadi bukan hanya dari *klak-klik* separtai se konstituen atau kelompok di bawah ketiak Sang Gubernur. Saya diminta untuk presentasi *Konsep dan Strategi Pengembangan BPD Sumbar*. Jadi bukan hanya seperti bicara di lapau atau khotbah di mesjid. Judul epik presentasi saya di Kantor Menaker itu : “*Manjangkau Pitih di Rantau*”

Tiga issue utama yang saya presentasikan waktu itu adalah bahwa BPD Sumbar (1); harus berani merantau ke luar Sumbar, (2) hijrah dari BUMD jadi PT dan, ini sangat penting, (3) membatasi campur tangan Pemda dalam kepemimpinan dan manajemen BPD.

Butir yang terakhir ini sangat-sangat penting walaupun kondisi BPD Sumbar pada waktu itu tidak seburuk kondisi *Sekarlut*. Tapi Gubernur milik rakyat dengan julukan HBD itu paham betul akan penting dan hakiknya pembatasan campur tangan Pemda itu (apa lagi kalau Partai ikut *cawe-cawe*) untuk kelangsungan hidup serta pengembangan sebuah bank. Berpotensi jadi malapetaka.

Prahara Campur Tangan Politik

Mayoritas BPD yang bobrok manajemennya, kacau operasionalnya dan rendah kinerjanya, hampir selalu ditandai oleh adanya campur tangan Pemda. Dan lebih parah lagi, campur tangan politik. Biasanya Pemda atau partai ingin menempatkan atau menitipkan orang-orang mereka pada posisi kepemimpinan bank. Tanpa memperdulikan kualifikasi dan kemampuan. Jabatan Komisararis, Direksi bahkan Komite Syariah sering jadi sasaran.

Contoh *anyar* yang nyata. Baru saja Bank Sumut mengalami kejadian yang dapat disangkakan sebagai “*prahara campur tangan*”. Paling tidak, dari pandangan kita, masyarakat yang tak tahu persis

apa yang sedang terjadi. Tapi ketika sang Dirut BPD tiba-tiba dicopot, lalu media nasional sekelas *Infobank* menulis tajuk (1 Februari 2023) ala Medan yang ganas pedas “*Tuan-tuan, Mengapa BPD Kau Jadikan Mainan, Bak Warisan Nenek Moyang*”, rasa-rasanya kemungkinan besar itu adalah masalah *follow mix* atau campur tangan politik, bahasa *Piaman-e*. Paling tidak sepupunya *Sekarlut*.

Apa lagi kalau partai politik sudah ikut punya agenda terhadap bank. Bersiaplah melafalkkan *Innalillahi*. Paling tidak bank itu bagai *kerakap* tumbuh di batu. Para politisi sering seolah gagal paham bahwa di perbankan ada adagium yang tak terbantahkan: *Hanya butuh satu malam membangun bank, tapi butuh bertahun-tahun membangun seorang bankir*.

Pesan Pendek Kepada Para Mantan

Selama mengawasi bank, saya sering sekali menemukan para bankir usungan atau titipan pejabat atau politisi yang jadi masalah. Bagi kita yang bukan orang politik, terkadang sulit memahaminya. Begitu pentingkah arti dan peran konsituen? Begitu utamakan kontribusi Tim Sukses? Hingga harus dicarikan pekerjaan atau bisnis. Kalau tidak merugikan lembaga dan negara, ya mungkin kita juga bisa memaksa diri mencoba untuk mengerti. Tapi yang sering terjadi adalah, calon yang diajukan tidak qualified.

Bahkan saya pernah menolak calon direksi bank pilihan politisi yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan walaupun dia seorang CEO perusahaan milik keluarga yang berhasil. Tak diterima oleh Bank Indonesia sebagai calon Dirut bank, karir sang CEO itu bersinar secara nasional. Cetar membahana. Dia jadi pembantu presiden. *Hebring*. Tapi tak lama, kawan itu berakhir dengan OTT dan berlabuh di hotel prodeo.

Sayapun mengirim pesan pendek kepada para mantan. Mantan anggota Tim Pengawas di Bank Indonesia yang pernah saya pimpin. Mereka sempat ketakutan ketika kami memutuskan menolak Sang CEO itu karena yang datang ke BI mengusung si calon adalah seorang tokoh partai di tingkat nasional. Dia sempat menunjuk-nunjuk anggota tim saya dengan tongkat, macam Kapolda baru diangkat. Ngeri-ngeri sedap juga tim saya. Tapi kami berpegang pada peraturan. Tolak dengan alasan tertulis yang jelas. Alhamdulillah, sang politisi bertongkat mau menerima alasan kami tersebut.

Pesan pendek (WA) saya kepada para mantan pengawas bank itu mengutip judul lagu penyanyi Country kondang, Randy Travis yang berbunyi: *I Told You So*

Pemerintahan ABS-SBK

Demi Bank Nagari yang sudah tumbuh dan berkembang dengan baik selama periode 4 (empat) Gubernur ini, Pemda harus disadarkan. Dan DPRD harus dibangun dari lelapnya. Fenomena *Sekarlut* dan lain-lain yang menyangkut Bank milik rakyat Sumbar ini perlu diatasi segera. Satu-satunya perusahaan daerah Sumbar yang bukan hanya mendatangkan keuntungan ratusan milyar tapi juga memperkerjakan ribuan karyawan.

Kawan, berkacalah dengan sesungguhnya pada prinsip ABS-SBK yang sangat sering didengarkan pada pidato dan seminar itu. Atasilah masalah Bank kita ini dengan bersungguh sungguh. Sebaiknya bangun kembali sistem yang pernah dibangun Gubernur Hasan Basri Durin bersama para Pebisnis Minang 3 dekade lalu. Naluri Pengawas Bank saya mengisyaratkan bahwa mungkin saja *Sekarlut* ini hanya *puncak gunung salju*. Banyak masalah kepemimpinan dan manajemen bank yang harus diperbaiki. Prinsipnya, kepemimpinan dan manajemen bank harus independen dan profesional.

Kadang saya terpikir ingin bertanya kepada tokoh kita, Buya Dr. Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Sumbar. Atau Buya serta Ustad/Ustazah lainnya. Secara agama, bagaimana hukumnya. Ada pihak berjanji setor modal usaha bersama. Tanda tangani kesepakatan atau akad istilah Islamnya, lalu modal yang dijanjikan tidak kunjung dipenuhi atau tidak disetor sebanyak yang dijanjikan. Politisi atau “ahli” komunikasi biasanya merespon dengan dalih indah: *Bukan tidak menyetor tapi “masih perlu waktu”*. Tapi laba (deviden) perusahaan tetap diterima dan dinikmati oleh pihak yang ingkar janji tersebut. Halal, subhat atau haramkah deviden itu? Entahlah!

Lebih dalam lagi, DPRD dan para cendekiawan Sumbar sangat perlu mengkaji dan mengatasi kondisi *Sekarlut* dan issue-issue penting lainnya secara tersistem. *Sekarlut* itu bisa disangkakan melanggar UU PT No. 40/ 2007 dan peraturan OJK. Akhirul kalam, teriring doa kami dari Rantau untuk Bank Nagari tercinta. Insya Allah.

Eko B Supryanto

(Direktur Infobank Institute)

Dari Padang Menembus Indonesia

Tidak satu jalan menuju Roma. Banyak jalan membahas masalah-masalah ekonomi. Kumpulan tulisan ini membahas banyak jalan menuju ekonomi daerah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menarik. Dalam tulisan demi tulisannya si penulis menyadari betul Peran Perbankan daerah dalam mengkatrol ekonomi daerahnya. Masalah bank daerah menjadi episentrum tulisan dalam buku kompilasi berjudul “Sakarlut” ini.



Buku kompilasi ini terlahir dalam rentang waktu yang cukup panjang. Buku kompilasi Esai Ekonomi ini juga memuat banyak hal dan tema menarik. Hebatnya lagi dalam menuliskan buah pikirannya si penulis menggunakan pendekatan lokal dan petuah-petuah Minang yang jelas menimbulkan kesan tersendiri.

Sun Tzu dalam bukunya berjudul *The Art of War* berkata, “Di tengah kekacauan, pasti juga ada kesempatan”. Di mata saya, bung Two Efly juga menangkap dan melakukan pendekatan seperti itu dalam buku berjudul “Sakarlut” ini.

Dengan bahasa sederhana tapi menghujam, penulis mencoba menguraikan satu demi satu masalah ekonomi di Sumatera Barat. Terus terang saya melihat tak hanya tumpukan masalah yang disodorkan ke pembaca, namun penulis juga mencoba memaparkan peluang yang terselip dari masalah yang dikupas. Tak hanya sebatas memberikan kritik atas masalah yang dikupas, namun dalam setiap kupasannya penulis menawarkan solusi dengan detail dan penuh rasa tanggung jawab.

Soal keuangan (perbankan) memang menjadi titik fokus penulisan dalam buku berjudul “Sakarlut” ini. Satu bagian khusus dengan belasan tulisan mengupas tuntas tentang perbankan daerah

(Bank Nagari). Dalam kupasan itu penulis menampilkan buah pikiran dan mazab perbankan. Penulis mencoba memaparkan mazab konvensional dan mazhab syariah. Dinamika tentang tarik ulur untuk konversi digarisbawahinya dengan “tinta tebal”.

Sakaret Ula Sakarek Baluik -- Sakarlut – yang digambarkan terhadap status badan hukum Bank Nagari merupakan kondisi yang menggantung. *Gray Area* lah, tidak jelas bentuk dan wujudnya seperti apa. Itu, kata penulis!! Hitam putih sebagai Perseroan Terbatas (PT), tapi tersorong menjadi Perseroda. Diputuskan konversi ke syariah tapi masih tetap konvensional yang punya layanan unit syariah.

Penulis dengan tegas dan berani menyebut, mau konversi atau tidak. Mau *spin off* atau tidak biarkan pasar yang menentukan. Tidak perlu disorong-sorong secara paksa yang justeru tidak akan menemukan jalan yang terbaik bagi bisnis Bank Nagari. “Teruntuk tuan-tuan yang menjadi pemandu sorak konversi, berhentilah menyorong-nyorongkan Gubernur,” demikian kalimat penulis dalam sebuah tulisan yang membahas tentang konversi Bank Nagari menjadi syariah. Biarkan proses bisnis berjalan, tegasnya.

Setoran modal dari pemegang saham untuk bisa menjadi Perseroda dan syariah sepertinya bisa berbalik arah. Dan, tampaknya penulis lebih condong Bank Nagari melayani dua mazab sekaligus. Yaitu mazab konvensional dan mazab syariah. Semuanya dapat dilayani dan bukan sekadar gerakan politik semata.

Masyarakat Sumatera Barat pun tampaknya lebih condong pada dual sistem – yang memang sudah diakomodasi di UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Jujur, pasca UU P2SK (UU Nomor 4 Tahun 2023). Akan jauh lebih baik bila mempunyai *dual system* – yaitu punya layanan konvensional dan layanan syariah yang keduanya sama-sama *keren*.

“Kemenangan datang dari peluang yang ditemukan dalam masalah,” demikian kata bijak dari Sun Tzu. Penulis juga membahas prestasi penting Bank Nagari di tengah Pandemi Covid-19 yang berat. Pembahasan ini makin menarik, karena secara jujur banyak peningkatan kinerja Bank Nagari. Dana, kredit dan pencapaian laba terus mendaki. Tanpa ragu penulis memberi apresiasi terhadap prestasi manajemen Bank Nagari.

Tiga topik lainnya seperti, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kenaikan harga pangan yang melompat-lompat dan pemekaran Sumatera Barat – Provinsi Pematang Jaya dibahas secara kritis. Tulisan-tulisannya tajam. Tulisan ini juga, sekaligus memberi arah jalan yang baik. Saya melihat buku ini tidak hanya layak untuk dibaca oleh akademisi, tapi juga kalangan keuangan dan tentu masyarakat dunia usaha dan umum.

Topik-topik bahasan memang beragam menyangkut ekonomi di Sumatera Barat, tapi jujur masalah di Sumatera Barat ini juga menjadi masalah nasional. Dari Padang menuju Indonesia. Dan, buku kumpulan esai ekonomi ini memberi solusi dari banyak masalah yang ada. Jadi, layak dikoleksi dan dibaca untuk menimbulkan inspirasi baru lagi. Selamat membaca.

Dr. Gamawan Fauzi, S.H., MM.

(Mendagri Periode 2009-2014)

Sekali lagi saya diminta oleh Two Efly untuk memberi pengantar/endorse pada bukunya yang keempat ini. Kali ini buku baru tersebut berjudul “Sakarlut”. Unik dan sedikit nakal kesan judulnya, *he he he*.

Di mata saya, Two Efly adalah salah seorang dan sedikit di antara wartawan yang produktif menulis buku di di antara sekian banyak wartawan Sumatera Barat. Dia memang rajin mencermati hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat. Bila pada tulisannya yang lalu, Two Efly mencermati dan mendalami persoalan Bank Nagari yang seperti tengah berada di persimpangan jalan, antara memilih menjadi Bank Umum Syariah atau bertahan menjadi Bank Umum Konvensional,



maka kali ini tulisannya kembali menyorot status Badan Hukum Bank Nagari yang kembali berada di persimpangan. Itulah *Sakarlut* antara PP 54/2017 dan UU No 40/2007. Persimpangan antara Perseroan atau Perseroan Terbatas.

Bedanya dengan buku-buku sebelumnya, dalam buku berjudul “Sakarlut” ini Two Efly mulai banyak menyoroti hal-hal yang terkait dengan kebijakan Pemerintah daerah secara tajam. Dia mengikuti setiap langkah dan ucapan serta diskursus seputar dialog di DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah (Gubernur atau eksekutif) Provinsi Sumatera Barat dalam mengalokasikan anggaran, menggunakan dan pencapaiannya. Two Efly dengan cermat melihat setiap perubahan dan pergeseran yang terjadi di daerah yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah (pusat). Tentu saja ada hal-hal yang disorot dan dikritisi menurut pemahamannya dalam mencermati, mulai dari masalah Keuangan, Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur, Pariwisata, bahkan sampai harga pangan. Two Efly juga menyorot soal pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan membandingkan kemajuannya dengan beberapa provinsi tetangga dengan data yang tersedia.

Kadang kritik terdengar tidak mengenakkan, tapi bagi hati yang lapang dan pikiran jernih, kritik adalah obat yang menyehatkan disaat kita ingin lebih baik. Bahkan sebaliknya, puja dan puji, seringkali membuat kita lupa serta lalai. Penyesalan biasanya ada di ujung jalan, pada saat kita kehilangan kesempatan untuk mengubah.

Tulisan ini tentunya bukan ditujukan untuk seorang figur tapi untuk membangunkan kita semua yang mungkin lupa. “Lawan debat adalah sahabat dalam menambah kecerdasan berfikir”. Karena itu, bila tulisan ini dianggap “berbeda”, sesungguhnya itu adalah “hadiah” yang patut diterima untuk ditelaah dengan dalam dan jernih. Poin-poin dan buah pikiran yang termuat didalam tulisannya adalah dalam rangka menambah spirit dan memacu semangat mencapai kemajuan tertinggi yang mungkin dapat diraih.

Sumatera Barat, menjadi takdirnya tidak memiliki Sumberdaya alam tambang yang besar, dan juga tidak memiliki lahan yang luas untuk menjadi daerah perkebunan yang besar seperti beberapa provinsi tetangga Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Meskipun begitu Sumatera Barat memiliki keunggulan lain yang juga tidak dimiliki Propinsi kaya Sumber daya alam itu.

Sumatera Barat memiliki potensi Sumberdaya manusia yang baik, budaya yang mendorong munculnya kegigihan berusaha, dan alamnya yang indah dan terdampar di hampir semua kabupaten/kota.

Tanpa bermaksud memuji muji kehebatan masa lalu, sesungguhnya daerah ini pernah sangat unggul dalam bidang pendidikan, pernah menjadi tempat bersekolah masyarakat daerah lain. Bahkan di tahun 1926, jumlah sekolah di Sumatera Barat lebih banyak dari jumlah sekolah di seluruh pulau Jawa dan Bali.

Lahirnya sejumlah pujangga besar dan penulis cerita dari Sumatera Barat, menunjukkan kekayaan budaya dan keindahan alam sejak dulu kala. Di masa lalu, banyak orang dari daerah lain yang ingin datang ke Sumatera Barat karena mereka ingin melihat dengan mata sendiri seperti apa eloknya alam dan budaya Minangkabau setelah mereka membaca tulisan penyair penyair asal Sumatera Barat.

Bila potensi itu belum mampu dijadikan kekuatan ekonomi yang besar untuk kemajuan daerah, mungkin saja kita belum menemukan jalan yang benar atau belum menempatkan kebijakan untuk mengeksploitas potensi itu.

Two Efly dalam buku ini banyak mengungkit hal-hal yang berkembang, mungkin masyarakat Sumatera Barat bisa bersama-sama memaknainya lebih dalam dan memberikan jalan untuk kemajuan yang lebih besar.

Selamat saya sampaikan kepada saudara Two Efly. Anda sudah menorehkan tulisan untuk membangunkan kami yang masih tidur atau yang tak mau tahu dengan masa depan kita bersama. Mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi anda. Aamiiin

Padang, 5 Februari 2023

Prolog

Sama dengan buku buku sebelumnya, buku berjudul “Sakarlut” ini juga hadir dari “kegelisahan” penulis melihat dinamika ekonomi di Sumatera Barat dan kebijakan ekonomi nasional. Negeri yang semestinya makmur dengan segudang potensi ini ternyata tak kunjung mampu *rebound* dan bangkit. Sumatera Barat yang dimasa lalu menjadi *role model*, kini berubah menjadi *follower*. Sumbar kian tercecce dari Provinsi Riau dan nyaris sejajar dengan Provinsi Jambi. Dua ranah Melayu itu ekonominya berkembang pesat. Selain pertumbuhan ekonomi Sumbar yang “bonsai” dibandingkan rata pertumbuhan ekonomi nasional juga ditemukan banyak kendala lain yang membuat negeri ini selalu tercecce dibelakang.

Buku ini ditulis dengan runut dan runtut. Bak bercerita lisan, pikiran penulis dituangkan dalam bait demi bait kata hingga menjadi kalimat. Penulis mencoba membahasakan buah pikirnya dengan sesederhana mungkin agar dapat dengan mudah ditangkap pesannya.

Buku dengan judul “Sakarlut” ini terdiri dari empat bagian besar. Setiap bagian memuat tema yang berbeda. Mulai dari keuangan, anggaran, infrastruktur hingga ke ketahanan pangan dan energy. Dalam setiap bagian terdapat beberapa tulisan dan setiap tulisanpun memiliki karakter yang terbilang kuat yang disesuaikan dengan realita saat itu.

Judul “Sakarlut” sendiri merupakan akronik dari kalimat “*Sakarek Ula Sakarek Baluik*” (tak jelas bentuk dan wujudnya-red). Judul ini diambilkan dari fenomena yang terjadi pada Bank Nagari. Gonjangan politik dalam suksesi kepemimpinan Bank Nagari dimasa lalu menyeret Bank Nagari kedalam wilayah “Abu abu”. Secara badan hukum, status Bank Nagari ini tak jelas bentuknya. Dalam Akta Perusahaan status Bank Nagari adalah Perseroan Terbatas (PT) sementara dalam pelaksanaan pemilihan pucuk pimpinan perlakuannya seperti Perseroda.

Kebijakan untuk menjadi Perseroda tak ubahnya bak “Bumerang”. Keberanian Pemprov Sumbar menyanggupi diri menjadi pemegang saham mayoritas kini menjadi senjata yang berbalik arah. Hak dan kewajiban tak berjalan seiring bagi pemegang saham mayoritas (pemprov-red). Hak untuk membentuk pansel sudah diterima dari jauh hari, sementara kewajiban untuk menyetorkan saham kembali tak pernah kunjung terpenuhi.

Kebijakan “talonsong” dimasa lalu juga menjadi senjata berbalik arah. Keinginan Pemprov untuk melaksanakan konversi dari bank konvensional menjadi bank umum syariah juga tersandung regulasi Perseroda. Regulasi mewajibkan pemegang saham melaksanakan kewajiban pemenuhan modal. Sepanjang modal untuk menjadi pemegang saham mayoritas tak terpenuhi maka “lampu hijau” untuk pelaksanaan konversipun tersandung.

Dalam bagian pertama buku ini penulis menempatkan materi tentang lembaga keuangan. Mulai dari tema “Sakarlut” (Perseroan Terbatas vs Perseroda) hingga ke Sinyal Kuning Ekonomi. Selain itu juga ada langkah jitu dari manajemen Bank Nagari dalam menyulap bencana menjadi peluang. Peristiwa *Skimming* untuk pertama kalinya terjadi di Sumatera Barat mampu dikelola dengan baik. Kehilangan dana bagi nasabah tak berlanjut dan berujung pada *resiko likuiditas* dan *resiko reputasi*. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, nasabah semakin kental dan kian mempercayai Bank Nagari. Setidaknya ini dibuktikan dengan kian kuat dan menebalnya likuiditas Bank Nagari sebulan pasca bencana *Skimming* terjadi.

Masih seputaran lembaga keuangan. Pasca mulai rebound dan bangkitnya ekonomi, surplus likuiditas yang mendera dunia perbankan membuat manajemen Bank Nagari mesti memutar otak agar bisa mendistribusikan dana tersebut. Intermediasi mustilah

dijalankan agar tidak menimbulkan beban *tresurry*. Kepiawaian manajemen, tahun ajaran baru menjadi momentum yang harus dimanfaatkan. Sensitivitas dalam membaca pasar mampu dengan baik diperankan. Gimmik dan Momentum mendorong hadirnya *Reward Cashback*. Hasilnya sungguh diluar dugaan.

Dalam bagian pertama ini juga masih ada beberapa tulisan menarik lainnya seperti keberhasilan Bank Nagari membukukan kinerja terbaik disaat ekonomi masih sulit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Bank Nagari bisa membukukan laba melebihi angka Rp 406 Miliar. Masih banyak lagi tema tema menarik lainnya yang mampu disuguhkan pada bagian keuangan dan perbankan ini. Termasuk “kembali ke jalan yang benarnya” Pemprov Sumbar untuk bersyariah. Diawal tahun 2023 Pemprov memutuskan untuk berhijrah. Seperti apa? Silahkan dibaca tuntas esai berjudul “Berhijrah”.

Pada bagian kedua penulis mencoba mengangkat tema tema anggaran. Tema ini juga beranjak dari kecemasan penulis melihat cara dan target yang ditetapkan Pemprov Sumbar untuk lima tahun ke depan. Perda No 6 tahun 2021 jelas dan tegas memuat angka angka target kerja lima tahun ke depan. RPJMD ini juga merupakan penterjemahan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam RPJM itu, penulis melihat ada yang keliru. Banyak sekali yang musti dikritisi termasuk besaran target yang ditetapkan.

Maaf kata, RPJM secara gamplang memaparkan betapa pesismisnya kita di Sumatera Barat. Tak ada upaya lebih untuk bisa bangkit lebih cepat. Progress APBD dari tahun ke tahun bertumbuh sangat kecil. Re rata pertumbuhannya hanya diangka 2,5 persen. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Hingga tahun 2026 target pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 4,7 persen. Bagi penyusun RPJMD itu adalah target rasional karena disusun masih diera pandemic. Namun, seiring berjalannya waktu dan sudah pulihnya ekonomi nasional maka RPJMD tersebut menjadi tak relevan lagi. Revisilah APBD itu dan buatlah target yang optimis. Optimislah wahai anak negeri, negeri ini menunggu kerja kerasmu.

Selain mendorong agar pemprov Sumbar Optimis dan mengevaluasi RPJMD, penulis juga mengulas dan memintak pemprov untuk Fokus dalam bekerja. Hingga akhir semester 1/2022 kinerja anggaran Pemprov Sumbar terbilang sangat rendah. Serapan APBD

hanya tercapai 24,60 persen. Ini jelas sangat mencemaskan dan merugikan bagi public Sumatera Barat. APBD adalah trigger utama untuk mendorong lokomotif ekonomi daerah. Hentikanlah kegiatan kegiatan yang tak berorientasi dampak ekonomi seperti safari politik dari masjid ke masjid. Fokuslah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mengawal APBD 2022 ini.

Kecemasan penulis diawal dan pertengahan tahun 2022 akhir terkonfirmasi sudah. Memasuki akhir tahun anggaran Pemerintah memburukan pencapaian serapan anggarannya. Pada pertengahan Novemver 2022 serapan anggaran masih diangka 62 persen. Rendahnya serapan dan berpotensi membengkaknya Silpa (Sisa lebih Perhitungan Anggaran-red) membuat eksuktif "*kalimpasiang*". Serapan APBD dikebut. Bak sinetron kerjar tayang diakhir tahun serapan APBD berhasil mencapai ratio 95 persen. Konon kabarnya termasuk lima besar terbaiknya nasional. Berkualitaskah serapan APBD itu ? nanti kita lihat realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Apakah meningkat dan menyetuh angka 5,5 persen atau malahan justru sebaliknya.

Selain serapan anggaran, penulis juga menawarkan dan mendorong eksekutif bertindak kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Discont pajak yang sudah berlaku di Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta mustilah diadopsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, pertengahan tahun 2022 ide penulis ini direalisasikan. Discont pajak kendaraan diberlakukan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun naik tajam.

Untuk penutup bagian kedua ini penulis menyampaikan sebuah wacana untuk pengalihan subsidi BBM. Konsep Subsidi sama rata sama rasa yang dilakukan negeri ini dalam "*meminum*" Bahan Bakar Minyak sudah harus diubah. Melalui tulisan "*Membakar APBN*" penulis mencoba membuka wacana untuk menyesuaikan harga agar defisit APBN tidak semakin dalam. Rubahlah harga, rubahlah pola subsidiya. Semua ini semata mata untuk menyelematkan APBN. Sebulan pasca terbitnya tulisan ini pemerintah melakukan perubahan harga dan penataan distribusi BBM terutama untuk BBM bersubsidi seperti Peralite dan Bio Solar.

Pada bagian ketiga penulis mencoba menghadirkan beragam dinamika yang terjadi di Sumatera Barat. Sejumlah ledakan harga bahan pangan membuat anak negeri menjerit. Lado alias cabe benar

benar “Padeh”. Harganya melonjak tajam dari Rp 20.000-an menjadi Rp 120.000-an dalam rentang se bulan. Meroketnya harga cabe ini tentulah membuat emak emak menjerit. Jeritan pilu inilah yang penulis potret menjadi tulisan berjudul “Padeh!!!”. Selain harga cabe harga Minyak Goreng yang melambung juga menjadi tema penulisan.

Dalam bagian ketiga ini penulis juga memotret kembali bergairahnya transportasi darat, terutama untuk rute panjang Antar Kota Antar Provinsi. Bergairahnya kembali bisnis oto bus ini penulis tulis dengan judul “Oto Rebound”.

Pada bagian keempat penulis menghadirkan banyak tema tema menarik. Diawali dengan wacana pemekaran provinsi. Jarak yang terpaut jauh, kualitas infrastruktur yang kurang bagus antara daerah pinggir dengan ibu kota Provinsi membuat penulis merasa risih. Sudah saatnya Sumbar ini dimekarkan. Ide dan pemikiran ini penulis tuangkan dalam judul “Provinsi Pamalayu”. Saat buku ini diterbitkan panitia pemekaran tersebut sudah terbentuk. Para tokoh dan inisiator memberi nama Provinsi Sumatera Tengah.

Selain pemekaran provinsi, infrastrukturpun menjadi objek tulisan bagi penulis. Judulnya cukup “*nyelekit*”. “Wisata Macet”. Begitu namanya penulis berikan. Wisata ini bersifat musiman. Mulai dari *long week end* hingga ke libur lebaran. Setiap momentum itu selalu saja terjadi kemacetan yang luas biasa. Terutama di jalur jalur utama dari dan menuju objek wisata.

Kenapa macet? Karena ruas jalan sudah sangat tak sebanding dengan jumlah kendaraan. Sepuluh tahun belakangan pertumbuhan jalan tercecir jauh dibelakang pertumbuhan kendaraan. Parahnya lagi, infrastruktur yang sedikit tersebutpun kualitas jalannya terbilang tak bagus dan bahkan buruk. Penulis mendorong melalui tulisan berjudul “Wisata Macet” tersebut agar pemerintah daerah fokus dan memacu pertumbuhan infastruktur. Omong kosong kalau kita mau bicara dan menjadi daerah wisata kalau ketika liburan tiba terjadi macet dimana mana. Berbenahlah dan hadirkan jalan yang bagus dan representative.

Pada bagian keempat ini penulis kembali menghadirkan tulisan berbetuk auto kritik. “Nagari Rato rato Aia”. Begitu judul tulisannya. Dalam tulisan penulis mengurai bahwa Sumbar ini sudah berubah dibandingkan masa lalu. Jika dimasa lalu kita ini negeri *role model* maka saat ini Sumbar sudah menjadi negeri *follower*. Kita ini

negeri yang kemari tanggung. Maju tidak, tertinggal juga tidak. Kaya tidak miskin juga tidak. Pendidikannya tidaklah terbaik tapi juga tidak yang terburuk. Yaa rata rata air lah!!!. Hanya satu yang berlebih dan menonjol dari Sumbar saat ini. Apa itu? Ota balapik lapik.

Realita yang mencemaskan ini tak boleh dibiarkan. Semua pihak mustilah turun tangan. *Duduak basamo* dan berjuanglah bersama sama. Jangan biarkan Sumbar ini menjadi negeri rata rata air. Sumbar harus bangkit dan kembali menjadi negeri *role model* di jazirah pulau Sumatera. “Bangkitkanlah Batang tarandam” itu.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada karia yang sempurna. Penulis menyadari betul takdir tersebut. Dalam setiap bait dan kalimat tentulah ada pihak yang tersenggol. Ini bukanlah sebuah bentuk kebencian terutama untuk seorang public figus. Begitu juga kemarahan atas sebuah jabatan. Sentilah dan kritik ini adalah sebuah bentuk empathy dan kepedulian seorang anak negeri. Kalaulah dalam menguntai kata ada yang yang tidak tepat, kalaulah dari narasi ada pihak yang tersakiti maka kepada Allah penulis mintak ampun.

Padang, ... Januari 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar	(v)
Pengantar	
Dr. Romeo Romeo Rissal Pandjiaalam	(vii)
Eko B. Supryanto	(xiii)
Dr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M.	(xv)
Prolog	(xix)
Daftar Isi	(xxv)

BAB I K E U A N G A N

“Sakarlut”	(3)
– x - =	(9)
Gimmik dan Momentum	(14)
Berprestasi disaat Sulit	(19)
Musim Sulit yang Segera usai	(26)
Metaverse Perbankan	(35)
On The Track	(40)
Berhijrah	(45)
Finish, Ekstra Time, dan Tahun Politik	(50)
“Memanen” Prestasi	(55)

BAB II A N G G A R A N

Optimislah !!!	(65)
Fokuslah !!!	(71)
APBD “Kejar Tayang” .	(76)

“Kalah dibawah, Manang dilado”	(83)
“Membakar APBN”	(89)
“Damuik Gadang Kawuik”	(95)
 BAB III PANGAN DAN TRANSPORTASI	
“Padeh !!!”	(108)
“Tapaga Karambia Condong”	(113)
“Nyaris Bang Toyyib”	(120)
“Oto Rebound	(125)
Berang ka Mancik, Lumbuang Nan Dibaka	(131)
 BAB IV PEMEKARAN DAN INFRASTRUKTUR	
Provinsi Pamalayu	(140)
“Wisata Macet”	(147)
“Nagari Rato-rato Aia”	(153)
Negeri Penuh Paradoks	(160)
 Kosa Kata	(166)
Sumber Foto	(168)
Sumber Tulisan	(169)
Tentang Penulis	(171)